BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) di Kota Makassar, penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixed Methods* (Metode Campuran) dengan desain *Sequential Explanatory* (Urutan *Eksplanatori*) dengan tekhnik sampel menggunakan teknik *fixed quota* untuk dua populasi yang berbeda dengan lokus perbandingan di wilayah urban padat pusat kota (Puskesmas Maradekaya) capaian UHC tinggi dan wilayah sub-urban/pinggiran (Puskesmas Sudiang) capaian UHC rendah, menunjukkan dinamika empiris yang sejalan dengan kerangka konseptual *Lawrence Green (1980)* dan *Andersen (1995),* serta dapat dievaluasi menggunakan pendekatan teori kebijakan publik *Edwards III* (1980) dan *Systems Control Knobs Roberts* dkk. (2004). Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor Predisposisi *(Predispossing Factors)*

Faktor predisposisi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pemenuhan kepesertaan JKN dalam mewujudkan UHC di Kota Makassar. Faktor ini berkaitan dengan karakteristik internal individu dan masyarakat, terutama pengetahuan, sikap, tingkat pendidikan, serta kepercayaan terhadap penyelenggaraan program JKN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pentingnya kepesertaan JKN. Pengetahuan masyarakat mengenai manfaat JKN sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko biaya kesehatan menjadi dasar penting dalam membentuk keputusan untuk menjadi peserta dan mempertahankan kepesertaan aktif. Sikap positif masyarakat terhadap program, pemahaman mengenai manfaat perlindungan kesehatan keluarga, serta tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara turut memperkuat keberlanjutan kepesertaan.

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat belum sepenuhnya merata, khususnya terkait prosedur administrasi, perubahan status kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme pelayanan JKN. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan kepesertaan aktif tidak cukup hanya melalui perluasan cakupan administrasi, tetapi juga membutuhkan proses edukasi dan komunikasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, faktor predisposisi menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan, sikap, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap program JKN, maka semakin besar peluang masyarakat untuk mempertahankan kepesertaan secara aktif.

2. Faktor Pendukung (*Enabling Factors*)

Faktor pendukung merupakan faktor yang berkaitan dengan tersedianya sumber daya dan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh dan mempertahankan kepesertaan JKN. Faktor

tersebut meliputi kondisi ekonomi, kemampuan membayar iuran, ketersediaan fasilitas kesehatan, kemudahan akses terhadap pelayanan, kemudahan memperoleh informasi, serta dukungan sistem administrasi dan pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan dan kemudahan akses pelayanan merupakan faktor yang mendukung keberlangsungan kepesertaan JKN. Masyarakat pada lokasi penelitian secara umum dapat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hasil wawancara di salah satu lokasi penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat relatif tidak mengalami kesulitan dalam menjangkau puskesmas meskipun terdapat kondisi lingkungan permukiman tertentu.

Namun, kondisi ekonomi tetap menjadi tantangan, khususnya bagi peserta mandiri atau PBPU. Kemampuan membayar iuran secara rutin berpotensi memengaruhi keberlanjutan status kepesertaan aktif. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap JKN, tetapi apabila tidak didukung oleh kemampuan ekonomi, kemudahan pembayaran, dan sistem pelayanan yang mudah diakses, maka risiko ketidakaktifan peserta tetap dapat terjadi.

Oleh karena itu, faktor pendukung menegaskan bahwa pemenuhan kepesertaan JKN merupakan hasil interaksi antara kesadaran masyarakat dengan kemampuan sistem dalam menyediakan akses pelayanan, informasi, fasilitas, dan dukungan administrasi.

3. Faktor Kebutuhan (*Need Factors*)

Faktor kebutuhan merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi kesehatan dan persepsi masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap perlindungan pembiayaan kesehatan, pelayanan kesehatan secara rutin, pengobatan penyakit kronis, serta risiko terjadinya biaya kesehatan yang tidak terduga merupakan faktor penting yang mendorong masyarakat untuk menjadi dan mempertahankan kepesertaan JKN.

Instrumen penelitian menunjukkan bahwa faktor kebutuhan mencakup kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan rutin, perlindungan kesehatan keluarga, perlindungan dari risiko biaya kesehatan tidak terduga, serta kemudahan dalam memperoleh pengobatan dan pengelolaan penyakit kronis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa JKN dipersepsikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Semakin tinggi kebutuhan individu dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan, semakin besar pula kebutuhan untuk mempertahankan status kepesertaan JKN.

Dengan demikian, faktor kebutuhan merupakan salah satu pendorong penting dalam keberlanjutan kepesertaan aktif karena masyarakat yang memiliki pengalaman kebutuhan pelayanan kesehatan secara langsung cenderung memiliki persepsi yang lebih kuat mengenai manfaat JKN.

4. Faktor Sistem dan Kebijakan

Faktor sistem dan kebijakan merupakan faktor yang berkaitan dengan peran pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan sistem yang mendukung keberlanjutan kepesertaan JKN.

Penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam mendukung pembiayaan JKN, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan, koordinasi lintas sektor, kepastian regulasi, dan upaya meningkatkan kepatuhan merupakan komponen penting dalam mendukung pencapaian UHC.

Instrumen penelitian juga secara khusus menempatkan dukungan anggaran pemerintah daerah, transparansi pengelolaan JKN, koordinasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, puskesmas dan rumah sakit, kepastian regulasi, serta penerapan kebijakan kepatuhan sebagai bagian dari faktor sistem dan kebijakan.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan JKN membutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Kota Makassar, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan instansi terkait. Permasalahan kepesertaan, terutama yang berkaitan dengan perubahan data, status kepesertaan, dan kebutuhan pelayanan masyarakat, tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu institusi.

Dengan demikian, faktor sistem dan kebijakan memiliki peranan strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan

penyelenggaraan program JKN. Efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi, koordinasi, komunikasi, sumber daya, dan tata kelola antarinstansi

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kepesertaan JKN dalam mewujudkan Universal Health Coverage di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, faktor kebutuhan, serta faktor sistem dan kebijakan.

Keempat faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah. Pengetahuan dan sikap positif masyarakat perlu didukung oleh kemampuan ekonomi, kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan informasi, kebutuhan nyata terhadap pelayanan kesehatan, serta sistem kebijakan yang efektif dan terintegrasi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pencapaian cakupan kepesertaan yang tinggi belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan UHC apabila masih terdapat perbedaan antara jumlah penduduk yang terdaftar dengan jumlah peserta yang aktif. Hal tersebut juga tercermin dalam abstrak penelitian yang menempatkan rendahnya kepesertaan aktif sebagai tantangan penting bagi keberlanjutan sistem, meskipun cakupan kepesertaan telah mencapai target.

Oleh karena itu, kebijakan pencapaian UHC di Kota Makassar perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan cakupan kepesertaan administratif, tetapi juga pada peningkatan kepesertaan aktif,

keberlanjutan pembiayaan, kualitas pelayanan, validitas data kepesertaan, serta efektivitas koordinasi antarinstansi.

Dengan pendekatan tersebut, UHC dapat dimaknai tidak semata-mata sebagai keberhasilan dalam mendaftarkan penduduk ke dalam sistem JKN, tetapi sebagai kemampuan sistem kesehatan dalam memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan kesehatan yang aktif dan memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat kebijakan pencapaian UHC dengan mengubah orientasi dari sekadar pencapaian jumlah penduduk terdaftar menjadi peningkatan dan pemeliharaan kepesertaan aktif. Pemantauan secara berkala terhadap status kepesertaan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum terdaftar, peserta yang tidak aktif, dan kelompok yang berisiko kehilangan perlindungan kesehatan.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan keberlanjutan dukungan pembiayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan iuran, dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran dan kapasitas fiskal daerah.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Makassar

Dinas Kesehatan perlu memperkuat fungsi koordinasi dan pengendalian pelaksanaan JKN melalui sistem pemantauan kepesertaan aktif secara berkala. Puskesmas dapat dijadikan sebagai simpul informasi dan pendampingan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan kepesertaan yang terjadi di tingkat wilayah.

Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan, kelurahan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam proses pemutakhiran data dan penanganan masyarakat yang belum memperoleh perlindungan JKN.

3. Bagi BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan perlu terus memperkuat strategi komunikasi publik dan sosialisasi yang lebih mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat. Materi komunikasi tidak hanya berfokus pada manfaat JKN, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban peserta, mekanisme pembayaran iuran, perubahan data, pengaktifan kembali kepesertaan, prosedur pelayanan, dan mekanisme rujukan.

Pengembangan kanal digital perlu tetap disertai dengan pelayanan langsung dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi digital.

4. . Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis mengenai faktor dominan yang memengaruhi kepesertaan aktif JKN, khususnya pada peserta PBPU dan pekerja sektor informal. Penelitian juga dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan variabel seperti literasi kesehatan, literasi digital, kemampuan ekonomi, kepatuhan pembayaran iuran, kualitas pelayanan, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas integrasi data sebagai faktor yang memengaruhi keberlanjutan kepesertaan JKN.